



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018**
NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.098200/2018



05.1077-5473-1045-3625

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Negara.
- 3.UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(005)	MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi	:	(01)	BADAN URUSAN ADMINISTRASI
3. Provinsi	:	(05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Saklar	:	(098200)	PENGADILAN NEGERI JEMBER
Sebesar	:	Rp.	8.191.090.000 (DELAPAN MILIAR SERATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut .

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	8.191.090.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN J E M B E R	(131) Rp.	8.191.090.000
---------------------	-----------	---------------

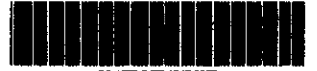
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengesahan berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan saklar dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Jakarta, 05 Desember 2017
AN MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td
ASKOLANI
NIP. 10980611192021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.01.2.098200/2018



06:1077-5473-1845-3655

Setker : (096200) PENGADILAN NEGERI JEMBER

01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp.	7.826.090.000
01.1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	7.826.090.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp.	285.000.000
02.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	285.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA-005.01.2.098200/2018
IA. INFORMASI KINERJA**



DB:1077-5473-1645-3665

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (068200) PENGADILAN NEGERI JEMBER

Kuasa Pengguna Anggaran : Linda Kusumawati,SH
Bendahara Pengeluaran : Farnah Eta Hardiani,SH
Pejabat Penanda Tangan SPM : Rini Widhiastuti,SH

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			8.191.090.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN			8.191.090.000
2 Program	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung			7.026.090.000
Sesaran Program	01	Tercapainya Dukungan Manajemen untuk Layanan Prima Peradilan			
Indikator Kinerja Program	01	Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi	16 Sistem Informasi		
	02	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif	1200 Kepegawaian		
	03	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan yang berada dibawahnya	45 Laporan Keuangan		
	04	Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien	10 Dokumen Perencanaan		
	05	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana menunjang pelayanan peradilan	8 Layanan Pengelolaan		
	06	Terselenggaranya pelayanan pimpinan	12 Bulan Layanan		
	07	Meningkatnya pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung	12 Bulan Layanan		
Output Program	01	Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung			
Indikator Output Program	01	Jumlah meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi	16 Sistem Informasi		
	02	Jumlah meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif	1200 Kepegawaian		
	03	Jumlah meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan yang berada dibawahnya	45 Laporan Keuangan		
	04	Jumlah meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien	10 Dokumen Perencanaan		
	05	Jumlah meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana menunjang pelayanan peradilan	8 Layanan Pengelolaan		
	06	Jumlah terselenggaranya pelayanan pimpinan	12 Bulan Layanan		
	07	Jumlah meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung	12 Bulan Layanan		
Kegiatan	1005	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			7.825.090.000
Sesaran Kegiatan	01	Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel			
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Satuan kerja yang mendapatkan pembinaan teknis pengelolaan keuangan			
	002	Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel			
	003	Pedoman pengelolaan keuangan negara			
	004	Laporan kegiatan biro keuangan			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.01.2.000200/2018
IA. INFORMASI KINERJA**



05.1077-5473-1045-3055

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Setkor : (008200) PENGADILAN NEGERI JEMBER

Kuasa Pengguna Anggaran : Linda Kusumawati,SH
Bendahara Pengeluaran : Faneh Eka Hardiani,SH
Pejabat Penanda Tangan SPM : Rini Widhiastuti,SH

Halaman : IA.2

Indikator Kinerja Kegiatan	005	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satkor daerah		
Output Kegiatan	1096.001	Layanan Dukungan Manajemen Satkor Daerah	12,00 Layanan	218.850.000
Indikator Output Kegiatan	01	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	12 Bulan Layanan	
Output Kegiatan	1096.994	Layanan Perkantoran	12,00 Layanan	7.707.240.000
Indikator Output Kegiatan	01	Layanan Gejil dan Tunjangan	12 Bulan Layanan	
	02	Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12 Bulan Layanan	
Program	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung		265.000.000
Sasaran Program	01	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan		
Indikator Kinerja Program	01	Sarana Prasarana Pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	3.583 Unit	
	02	Sarana Prasarana Pendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)	293 Unit	
	03	Peralatan Fasilitas Kantor Pendukung Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Mediasi	229 Paket	
	04	Gedung/Bangunan Pendukung SPPA, Mediasi dan Disabilitas	40.190 m2	
Output Program	01	Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung		
Indikator Output Program	01	Tanah	3113 m2	
	02	Bertifikat Tanah	24 Dokumen	
	03	Jaringan Instalasi	253 Jaringan	
	04	Sarana Prasarana Pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	3583 Unit	
	05	Sarana Prasarana Pendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)	293 Unit	
	06	Buku Hukum	500 Buku	
	07	Kendaraan Operasional	27 Unit	
	08	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	3804 Unit	
	09	Peralatan/Fasilitas Kantor	29403 Unit	
	10	Gedung Kantor sesuai Prototype yang Mendukung SPPA, Mediasi dan Disabilitas	40190 m2	
Kegiatan	1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		265.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan		
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Pengadaan Tanah di Lingkungan Mahkamah Agung		
	002	Pengadaan Bertifikat Aset Tidak Bergerak di Pengadilan		
	003	Pengadaan Jaringan Instalasi Kantor Pengadilan		
	004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA-005.01.2.096200/2018
IA. INFORMASI KINERJA**



09-1077-6473-1645-3055

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Name Satker : (096200) PENGADILAN NEGERI JEMBER

Kuasa Pengguna Anggaran : Linda Kusumawati, SH
Bendahara Pengeluaran : Farrah Eta Hardiani, SH
P pejabat Penanda Tangan SPM : Rini Widhiastuti, SH

Halaman : IA.3

Indikator Kinerja Kegiatan	005	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pilot Project SPPT		
	006	Pengadaan Buku Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung		
	007	Pengadaan Kendaraan Operasional Pengadilan		
	008	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kesekretariatan		
	009	Jumlah Pengadaan Peralatan/Fasilitas Kantor di Lingkungan Mahkamah Agung		
	010	Pengadaan Gedung Kantor Sesuai Prototype Pelayanan Publik		
Output Kegiatan	1071.951	Layanan Internal (Overhead)	1,00 Layanan	265.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	90379 m2	
	02	Pengadaan Peristitan Fasilitas Kantor	18302 Unit	
	03	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	7548 Unit	
	04	Pengadaan Kendaraan Bermotor	27 Unit	

Jakarta, 06 Desember 2017
Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI

Bd.
Dr. Drs. Aco. Nur, SH., M.H
NIP 195303131989031021